

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS PONDOK PESANTREN

Muhlas, Retno Indah Rahayu

Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Gresik

ABSTRAK

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous). Fokus penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pesantren dalam peningkatan mutu, eksistensi Pesantren, dan problematika dalam manajemen peningkatan mutu di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian menggunakan analisis data, keabsahan data. Dalam penelitian meneliti dua lembaga di kecamatan Omben Sampang. Dalam penemuan hasil penelitian yaitu: (1) kebijakan dalam penerimaan Bantuan BOS, Pembuatan RKAS, dan laporan harus mengikuti perintah Dinas pendidikan, transparan, kebijakan pembuatan perangkat oleh guru, sibus, RPP, Protas, Promes, dan KKM. (2) tujuan pengasuh membangun sekolah kejuruan agar santri tetap dilembaga dan untuk menarik minat orang tua dan koordinasi dalam pelaksanaan program pondok dan sekolah pendidikan formal harus dimusyawarakan, (3) problematika disekolah yang ada dipondok pesantren dalam temuan penelitian untuk sekolah kejuruan kurangnya guru produktif.

Kata Kunci: Manajemen, Mutu Pendidikan, Sekolah Kejuruan, Pondok Pesantren

a. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya sekolah merupakan salah satu sarana dan prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan, dengan syarat yang pertama yaitu ada seorang pelajar atau yang ingin menuntut ilmu dengan tujuan tertentu yang berkeinginan tujuan tersebut ingin tercapai dengan pengetahuan yang mereka peroleh sehingga mereka bisa memanfaatkan hasil dari apa yang mereka dapatkan setelah melaksanakan jenjang pendidikan yang siswa jalani selama belajar. Kedua yaitu seorang pendidik dimana sekolah membutuhkan guru atau seorang pendidik yang mengarahkan dan membimbing pelajar dengan pengetahuan serta ilmu yang dimiliki oleh seorang pendidik dengan mengorbankan jasa sampai pendidikan terakhir, ketiga yaitu kepala sekolah yang mengatur manajemen sekolah dari segi program lembaga dengan tujuan menjadi lembaga pendidikan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk putra-putri mereka menimba ilmu ditempat dimana orang tua siswa memasrahkan penuh dan mempercayai atas bimbingan yang akan di berikan pada siswa tersebut. Keempat adalah bagian staf sekolah agar sekolah berjalan dengan proses yang berkembang, maju, dan

tertip administrasi staf yang berperan aktif dalam pelaksanaan dengan baik menuju suksesnya sekolah menjadi sekolah maju.

Lembaga sekolah begitu sangat dibutuhkan dalam pendidikan diaktivitas pembelajaran karena sebagai tempat media interaksi antara guru, secara tidak langsung banyak tahapan dan proses agar sekolah terbangun dalam infrastruktur dan manajemen sekolah di tiap-tiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, sehingga masyarakat mempunyai daya tarik untuk mengenyang pendidikan dari orang tua siswa dan siswa itu sendiri yang berkeinginan memulai pendidikan mereka berharap mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik di hasil menuntut ilmu, dan demikian sekolah yang bermutu sudah pasti diminati oleh masyarakat dari pandangan, sekolah juga membutuhkan pengawasan dari pihak terkait agar sekolah bisa memiliki rasa tanggung jawab dalam memajukan sekolah dan sekolah harus mempunyai pengawasan melalui program pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi penjadi pengawas satuan pendidikan/sekolah.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, secara bahasa, ada yang mengatakan bahwa istilah pesantren

persantrian kata “santri” diambil dari bahasa Jawa yang artinya “murid”. Kata “santren” di padupadankan dengan kata “pondok” di duga di ambil dari bahasa Arab *Fudud* yang berarti “penginapan”. Sehingga istilah “Pondok Pesantren” merujuk pada satu makna, yaitu penginapan para murid.

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous). Sebab, lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Buddha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya ini tidak berarti mengecilkan peranan Islam dalam memelopori pendidikan di Indonesia.

Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah merupakan dua Pondok Pesantren di kabupaten Sampang yang menyediakan pendidikan formal maupun non formal bagi masyarakat dari setiap jenjang. Mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah kejuruan. Eksistensi kedua pesantren ini di kabupaten Sampang tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai pendidikan khususnya dalam peningkatan pengetahuan keagamaan. Bentuk dasar pesantren ini awalnya hanya memberikan pendidikan di bidang keagamaan melalui pengajian kitab klasik yang diberikan oleh pengasuh. Siring perkembangan zaman, dan sebagai upaya Pondok Pesantren dalam memberikan jawaban atas persoalan kehidupan masyarakat yang kompleks dan dari berbagai bidang khususnya dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan umum. Menuntut pesantren untuk merubah system pendidikan yang ada di dalamnya. Mulai dari pengelolaan administrasi pesantren sampai pada system pendidikan yang ada di dalamnya. Perubahan tersebut bukan hanya dilihat dari teknis pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalamnya tetapi perubahannya masuk dalam ranah penentuan kebijakan dan pelaksanaan tugas pengelolaannya.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus tersebut selanjutnya dirinci menjadi 3 sub fokus sebagai berikut. 1) Bagaimana kebijakan pesantren dalam peningkatan mutu sekolah kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah? 2) Bagaimana eksistensi Pesantren dalam pengembangan

operasional sekolah kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah? dan 3) Bagaimana problematika dalam manajemen peningkatan mutu di sekolah kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui kebijakan pesantren dalam peningkatan mutu sekolah kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah, 2) Untuk mengetahui eksistensi Pesantren dalam pengembangan operasional sekolah kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah dan 3) Untuk mengetahui problematika dalam manajemen peningkatan mutu di sekolah kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pengetahuan dan pemeikiran yang bermanfaat di bidang “Manajemen pendidikan” dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi persoalan manajemen peningkatan mutu sekolah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

a. Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai bahan acuan bagi civitas akademika, pengurus sekolah dan Pondok Pesantren khususnya di Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah

b. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sejenis.

b. KAJIAN PUSTAKAN

2.1 Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah

Manajemen peningkatan mutu sekolah atau madrasah merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat madrasah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Manajemen peningkatan mutu madrasah sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan. Sistemnya menawarkan sekolah atau madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik untuk peserta didik.

Manajemen peningkatan mutu sekolah/madrasah merupakan suatu Strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing madrasah/sekolah. Dengan demikian, kepala madrasah/sekolah, guru, peserta didik, dan orangtua mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan, dan mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah (Myers dan Stonehill dalam Nurkolis, 2003). Manajemen peningkatan mutu madrasah pada hakikatnya adalah suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada kepala sekolah/madrasah dengan melibatkan partisipasi individual, baik personel madrasah maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, dengan diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah akan membawa perubahan terhadap pola manajemen pendidikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi.

Manajemen peningkatan mutu sekolah yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain: (1) kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orangtua, dan guru, (2) bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal, (3) efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, dan (4) adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen madrasah, rancang ulang madrasah, dan perubahan Perencanaan yang didasarkan pada analisis perencanaan yang dilakukan oleh

madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2.2 Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah

Kata kebijakan (Hasbullah, 2015: 37) adalah terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertuju kepada tindakan (produk). Kata “kebijakan” jika dibandingkan dengan “pendidikan” maka merupakan hasil terjemahan dari kata “educational policy” yang berasal dari dua kata, sehingga (Hasbullah, 2015: 40) mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jika dilihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan.

Kebijakan pembiayaan sekolah/madrasah Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Adanya standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Berdasarkan rancangan pembiayaan operasional kebijakan sekolah juga tercantum dalam undang-undang Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Juknis BOS.

Kegiatan sosialisasi Penyusunan RKAS Perubahan Tahun 2019 dan Penyusunan RKAS Tahun 2020 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar sekolah sebagai pengelola dan pengguna dana BOS dapat menyusun perencanaan kegiatan dan kebutuhan sekolah benar-benar disusun dengan baik sekaligus direncanakan dengan teliti dan seksama dengan

mengedepankan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan dengan biaya yang dimiliki oleh Sekolah. Selain itu, dalam perencanaan kegiatan dan anggaran mengacu pada petunjuk pelaksanaan teknis BOS pada tahun anggaran berkenaan. Jangan sampai penyusunan RKAS keluar dari JUKNIS BOS sedangkan RKAS perubahan dan revisi RKAS disusun dan dibuat agar sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang tidak bisa direalisasikan bisa digunakan oleh sekolah dengan melakukan pergeseran rekening belanja.

2.3 Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/ Madrasah

Manajemen peningkatan mutu sekolah berkaitan erat dengan pembentukan madrasah yang efektif. sekolah yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut, (1) proses belajar mengajar mempunyai efektivitas yang tinggi, (2) kepemimpinan kepala madrasah yang kuat, (3) lingkungan madrasah yang aman dan tertib, (4) pengelolaan tenaga Pendidikan yang efektif, (5) memiliki budaya mutu, (6) memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis, (7) memiliki kewenangan kemandirian), (8) partisipasi yang tinggi dari warga madrasah dan masyarakat, (9) memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen, (10) memiliki kemauan untuk berubah (baik secara psikologis maupun secara fisik), (11) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, (12) responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan, (13) memiliki komunikasi yang baik, (14) memiliki akuntabilitas, (15) memiliki kemampuan menjaga susrainabilitas.

2.4 Tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah

Manajemen peningkatan mutu sekolah/madrasah yang ditandai dengan adanya otonomi yang diberikan kepada sekolah/madrasah dan adanya keterlibatan aktif masyarakat terhadap sekolah merupakan respons yang diberikan pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

Sekolah/madrasah harus mampu membuat *school plan* dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan ini harus dibuat agar sekolah mempunyai rambu-rambu yang bisa dijadikan landasan dalam pelaksanaan program-program madrasah yang melibatkan partisipasi seluruh warga madrasah dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua komponen tersebut dapat bekerja sama dalam

mengembangkan madrasah dan mengetahui visi dan misi yang dimiliki oleh madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

2.5 Pemberdayaan Guru dalam Konteks Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah

Dalam pemberdayaan guru, guru yang mempunyai bakat dalam mengajar anak-anak dalam pengejar pemerintah merumuskan dalam undang-undang Kebijakan pemerintah terkait revitalisasi SMK. Dirumuskan dalam Inpres No 9 Tahun 2016, untuk menyusun suatu road map yang jelas dalam memenuhi kebutuhan guru produktif yang didukung oleh data yang akurat dan dasar hukum yang kuat tentang Redistribusi Guru, dan mensosialisasikan kepada unit terkait di propinsi tersebut dan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan juga undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

Pemberdayaan sebagai usaha peningkatan pemahaman sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik dalam sistem organisasi sekolah.

2.6 Kerangka Kerja dalam Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah atau Madrasah

Kerangka kerja dalam konteks manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah ini didasarkan pada rencana strategis sekolah dalam pengembangan sekolah yang bermutu. Setiap sekolah atau madrasah hendaknya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik pada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik, jika disertai dengan pembuatan rencana yang matang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan sekolah inilah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat kerangka kerja dan meningkatkan kinerja sekolah secara efektif dan efisien.

2.7 Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah

Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah karena sekolah pada umumnya dihadapkan pada kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Suatu kegiatan yang ada di sekolah dapat dikatakan efisien jika dapat mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan atau pe-
Efektivitas merupakan sekolah yang

mengacu pada kinerja dalam satuan unit organisasi yang disebut ‘sekolah’ yang dilihat dari *output* sekolah tersebut yang diukur dengan prestasi dalam nilai rata-rata murid pada akhir masa pendidikan sekolah normal. Dalam kinerja sekolah itu mempunyai efektivitas yang berbeda sejauh mana sekolah-sekolah berbeda ketika kemampuan bawaan dan latar belakang sosio-ekonomi murid-murid sekolah itu sedikit banyak sama. makaian sumber daya yang minimal.

2.8 Manajemen Pendidikan Pesantren

Salah satu kelebihan sistem pendidikan pesantren adalah keberadaan Pondok atau asrama yang menjadi tempat tinggal santri selama 24 jam setiap hari. Apabila Pondok atau asrama ini diberdayakan untuk memberlakukan sistem pembelajaran yang maksimal, ia sangat berfungsi secara efektif dalam memperlancar pembelajaran dan sekaligus hasil-hasilnya.

Melalui Pondok atau asrama itu, banyak manfaat yang bisa diraih, antara lain:

- Memudahkan kontrol pada kegiatan santri.
- Memfasilitasi interaksi belajar sesama santri maupun dengan ustadz dan kyai.
- Memberikan waktu belajar yang luwes kepada santri.
- Memudahkan pemecahan masalah atas kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi santri.

2.9 Eksistensi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Operasional Pendidikan Sekolah Formal

Pesantren dianggap sebagai satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia yang menganut sistem tradisional. Pengertian tradisional di sini yaitu dalam arti bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun yang lalu dan telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan umat, bukan tradisional dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian.

Pendirian pesantren siswa di madrasah (sekolah) tersebut sebagai pengalaman terbalik 180 derajat dengan kecenderungan pesantren-pesantren modern (*pesantren salafi*) selama ini. Di dalam kompleks pesantren-pesantren modern tersebut telah cukup lama didirikan madrasah maupun sekolah formal sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem pendidikan sekuler. Jika belakangan ini sedang marak pendirian pesantren siswa di dalam kompleks madrasah (sekolah), hal ini berarti sedang terjadi upaya peniruan terhadap pesantren.

Akhirnya, baik pesantren maupun madrasah (sekolah) memiliki kecenderungan untuk saling meniru satu sama lain. Akan tetapi, motif peniruannya sangat berbeda. Pesantren meniru sistem pendidikan sekuler karena motif ekonomis agar jumlah santri pesantren meningkat atau setidaknya tetap bertahan. Sedangkan peniruan madrasah (sekolah) terhadap pesantren karena motif peningkatan mutu pendidikan madrasah (sekolah) tersebut; disebabkan keberadaan pesantren siswa di dalam madrasah (sekolah) diyakini memiliki fungsi yang sangat besar apabila diberdayakan secara maksimal.

2.10 Problematika Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Kejuruan di Bawah Naungan Pondok Pesantren

Mewujudkan Pesantren Kejuruan merupakan salah satu alternatif dalam usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya. Sistem pendidikan model Pesantren Kejuruan ini merupakan penerapan sistem pendidikan Islam integral, yaitu melakukan perpaduan antara kurikulum Pesantren yang hanya mengajarkan materi pelajaran agama, dengan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan kurikulum umum yang berbasis kepraktisan.

Problematika sekolah kejuruan dalam kaitan mendirikan sekolah kejuruan yaitu yang bertentangan dengan kebijakan aturan lembaga pondok santren wajib magang siswa dalam undang-undang Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

c. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut Bogda dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau tulisan dari orang dan perilaku yang diamati. Selain itu dengan pendekatan ini diharapkan peneliti akan lebih dekat pada subjek penelitian yang akan diteliti serta lebih peka dan akan lebih berinteraksi dalam penyesuaian diri.

3.2 Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku Metodologi Penelitian

Kualitatif mengungkapkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lembaga melalui daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Pengumpulan data ini dilakukan terhadap individu-individu yang terkait dengan manajemen peningkatan mutu sekolah kejuruan berbasis Pondok Pesantren di SMK Darul Ulum II Wadiyah dan SMK Al-Amanah Omben Kabupaten Sampang melalui beberapa sumber, yaitu:

- a. Pengasuh pondok yang merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam sebuah pesantren dalam membentuk karakteristik satu pesantren serta menentukan aspek termasuk juga dalam pengelolaan lembaga pendidikan formal dan non formal di dalamnya.
- b. Kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan pimpinan dan pemegang keputusan atas apa yang akan dilakukan atau direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai terhadap sistem evaluasi kinerja dalam upaya meningkatkan kinerja guru.
- c. Guru karena Guru merupakan pelaksana dan perencana atas program-program dan merupakan objek pengembangan sumber daya manusia melalui sistem sekolah.

Dengan menggunakan beberapa sumber data tersebut diharapkan peneliti dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada 3 (tiga) yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi.

3.4 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Data yang akan dianalisis yaitu melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tahap-tahap analisis data yaitu sebagai berikut: a) Reduksi data, b) Penyajian Data, dan c) Penarikan Kesimpulan.

d. PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

4.1 Kebijakan Pesantren Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Kejuruan Di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah Omben Sampang Dan Sekolah Kejuruan Di Pondok Pesantren Al-Amanah Omben Sampang

Pada dasarnya kebijakan disetiap lembaga lembaga Pondok Pesantren jika lembaga tersebut membuka sekolah pendidikan formal maka separuh kebijakan disetiap lembaga tersebut harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk berjalannya peningkatan mutu sekolah. Dalam hal ini secara umum kebijakan inspektorat kementerian pusat dalam menyalurkan dana disetiap pada lembaga-lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta wajib mengikuti aturan dan kebijakan dalam penyusunan pembuatan Rencana Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pendanaan bantuan untuk siswa di Indonesia agar porasional sekolah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu Kegiatan sosialisasi Penyusunan RKAS dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar sekolah sebagai pengelola dan pengguna dana BOS dapat menyusun perencanaan kegiatan dan kebutuhan sekolah benar-benar disusun dengan baik sekaligus direncanakan dengan teliti dan seksama dengan mengedepankan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan dengan biaya yang dimiliki oleh sekolah. Dengan hal ini semua lembaga hawajib mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah meskipun lembaga tersebut berada dinaungan Pondok Pesantren dengan cara mentoleransi kebijakan aturan yang di buat oleh mendikbud.

Selain itu dalam pengelolaan dana yang sudah dicairkan oleh lembaga sekolah maka tuntutan sekolah untuk melaporkan kebutuhan

apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah untuk siswa. Dengan tersebut dibentuk lah kebijakan laporan dana tersebut dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) selama satu tahun dan bisa dicairkan setiap tiga bulan sekali. Jumlah dana yang bisa dicairkan pertahun bergantung pada jumlah siswa yang mengeyang pendidikan formal di lembaga tersebut melalui data siswa di dapodikdasemen, agar sekolah bisa terlaksana dengan baik dalam bentuk pendaan sekolah pengelola sekolah harus wajib mekakasakan untuk memajukan sekolah tersebut agar manajemen sekolah bisa berjalan sengan baik dan efesien, efesien disini disejalakan dalam bentuk teoritis yaitu *efisiensi* merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah karena sekolah pada umurnya dihadapkan pada kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Dalam pendanaan sekolah sangat jelas jika sekolah tidak bisa melaporkan dan tidak membuat laporan dana tersebut sekolah akan terhambat untuk mencairkan dana tahap selanjutnya karena pemerintah sudah memberikan kebijakan bersayarak. Dana sekolah bisa dicairkan jika sudah melengkapi administrasi sekolah yaitu laporan pencairan dana pembelanjaan sekolah.

Dalam hal pembahasan pembangunan dalam peningkatan mutu sekolah memang wajib sekolah atau lembaga pondok mempunyai dana untuk modal dan berinvestasi dengan membangun sekolah pendidikan formal guna untuk mengikuti zaman. Secara harfiah saja orang tua dizaman sekarang mereka lebih mementingkan masa depan mereka di dunia, dengan mengatasi hal berikut maka setiap pengasuh yang mendirikan Pondok Pesantren salafiyah akan diganti menjadi Pondok Pesantren modern agar anak-anak asuh yang ada diPondok Pesantren mendapatkan ilmu yang imbang bukan hanya memperdalam ilmu agama saja akan tetapi memperdalam ilmu umum agar orang tua mereka bangga atas ilmu-ilmu yang mereka cari yaitu memiliki akhlak, cerdas, terampil, dan berbakat dari segi ilmu agama dan ilmu umum.

Dalam kebijakan lainnya bagi guru adalah membuat sebuah perangkat mengajar untuk meningkatkan manajemen pendidikan pada peserta didik demi perkembangan peserta didik secara maksimal agar peserta didik merima ilmu dari gurunya secara bertahap dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dilihat dari segi pendidikan guru yang sudah memenuhi syarat maka mereka dituntut untuk membuat perangkat seperti silabus, RPP, Prota, Promes, dengan

pembuatan perangkat tersebut guru bisa menerapkan model pembelajaran dialamnya. Dengan pembuatan dan perencanaan ini akhirnya kebijakan dari kabupaten kota menurunkan aturan kebijakan untuk pengawas sekolah agar turun tangan membina dan membimbing guru-guru pengajar dalam pembuatan perangkat sebelum melaksanakan belajar mengajar untuk siswa mereka.

Sebagaimana putusan dalam Guru harus menerapkan berbagai pendekatan, pembelajaran yang mendidik secara kreatif, inovatif dan variatif dalam mata pelajaran yang diampunya. Menurut Pris Kram Pemberdayaan guru secara optimal. Guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan diri secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermakna.

Guru bukan cuma hanya mengajar saja dikelas tapi juga wajib belajar dan mengikuti pelatihan demi menerapkan metode pelajaran secara berkala. Guru wajib juga mengikuti acara bagaman pembuatan perangkat sekolah dan bagaimana juga cara menerapkan metode pemebelajaran tersebut pada anak didiknya, sehingga siswa tidak jenuh. Dengan adanya metode tersebut maka sistem tersefer ilmu bisa didapatkan oleh siswa dengan menggunakan perangkat Silabus, RPP, dengan kebijakan Kurikulum yang sudah tersusun disetiap materi pembelajaran di buku ajar siswa.

4.2 EKSISTENSI PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL SEKOLAH KEJURUAN DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM II AL-WAHIDIYAH OMBEN SAMPANG DAN SMK AL-AMANAH OMBEN SAMPANG

Dalam perkembangan oprasional pesantren dimana sekolah pendidikan formal berada dingaungan lembaga tersebut agar santri dan santri wati bisa menyenyang pendidikan formal dipodok pesantren. Maka terbentuklah tujuan dari SMK kejuruan dibawah naungan Pondok Pesantren dengan alasan (1) Agar santri bisa belajar di area pondok karena pondok itu belatar belakang asarama islam dimana ada batasan-batasan untuk mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan. (2) Adanya efek pembunuhan karakter santri terhadap padangan masyarakat dengan hal yang negatif karena kebijakan lembaga pondok dimanapun itu santri tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran diluar pondok kecuali izin dari pengasuh atau pengurus pondok (3) Dibangunnya sekolah pendidikan formal mengikuti zaman dimana orang tua dan anak

mempunyai gagasan yang sama memilih Pondok Pesantren yang modern dalam hal Pondok Pesantren yang ada lembaga formalnya karena orang tua anaknya mempunyai masa depan dan bekal ilmu yang seimbang dalam menuntut ilmu ke lembaga tersebut.

Dengan hal demikian dibangunlah sekolah formal oleh beberapa pengasuh bertujuan untuk santri dan juga untuk bertujuan menarik minat masyarakat di berbagai kota dengan pesantren modern. Menurut Ridwan Abdullah Pendirian pesantren siswa di madrasah (*sekolah*) tersebut sebagai pengalaman terbalik 180 derajat dengan kecenderungan pesantren-pesantren modern (*pesantren salafi*) selama ini. Di dalam kompleks pesantren-pesantren modern tersebut telah cukup lama didirikan madrasah maupun sekolah formal sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem pendidikan sekuler. Jika belakangan ini sedang marak pendirian pesantren siswa di dalam kompleks madrasah (*sekolah*), hal ini berarti sedang terjadi upaya peniruan terhadap pesantren. Akhirnya, baik pesantren maupun madrasah (*sekolah*) memiliki kecenderungan untuk saling meniru satu sama lain. Akan tetapi, motif peniruannya sangat berbeda. Pesantren meniru sistem pendidikan sekuler karena motif ekonomis agar jumlah santri pesantren meningkat atau setidaknya tetap bertahan. Sedangkan peniruan madrasah (*sekolah*) terhadap pesantren karena motif peningkatan mutu pendidikan madrasah (*sekolah*) tersebut; disebabkan keberadaan pesantren siswa di dalam madrasah (*sekolah*) diyakini memiliki fungsi yang sangat besar apabila diberdayakan secara maksimal.

Setiap lembaga pendidikan Pondok Pesantren pasti mempunyai lembaga pendidikan formal yang sangat kompetitif dengan lembaga pendidikan formal makan dengan adanya musyawarah dalam ruang lingkup kebijakan lembaga yang berbeda maka sebaiknya dilakukan secara berstruktur seperti izin ke pengasuh dalam program tersebut maka hal ini tidak akan memberatkan pada pengurus jika pelaksanaan kegiatan apapun izin ke pengasuh karena lembaga Pondok Pesantren bagi pengasuh semua lembaga itu sama dan kebijakan yang baik itu diputuskan oleh ketua yayasan tersebut.

4.3 PROBLEMATIKA DALAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU DI SEKOLAH KEJURUAN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM II AL-WAHIDIYAH OMBEN

SAMPANG DAN AL-AMANAH OMBEN SAMPANG

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja Dalam problematika sekolah disini yaitu pada guru produktif yang memang sulit dicari karena hal ini karena kebijakan dari Dinas Pendidikan tidak mendapatkan izin untuk memilih jurusan yang diinginkan oleh sekolah alasan tersebut jurusan yang pilih sudah banyak di programkan di sekolah-sekolah kejuruan lainnya jadi keputusan ini dampaknya pada lembaga dan siswa yang ingin belajar hal ini perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah terkait revitalisasi SMK, khusus terkait dengan revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, maka yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi adalah melakukan pembicaraan dan kajian mendalam tentang arah kebijakan Pendidikan kejuruan di provinsi, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh propinsi, selanjutnya perlu duduk Bersama antar semua komponen yang terlibat dalam Inpres No 9 Tahun 2016, untuk menyusun suatu road map yang jelas dalam memenuhi kebutuhan guru produktif yang didukung oleh data yang akurat dan dasar hukum yang kuat tentang Redistribusi Guru, dan mensosialisasikan kepada unit terkait di propinsi tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori dan laporan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kebijakan pesantren dalam peningkatan mutu sekolah, dan Eksistensi manajemen sekolah kejuruan dan problematika dalam peningkatan mutu sekolah Darul Ulum II Al-Wahidiyah Omben Sampang dan Sekolah Kejuruan di Pondok Pesantren Al-Amanah Omben Sampang. Dari sekolah keduanya tersebut telah berupaya untuk meningkatkan sekolah dengan menempuh kebijakan-kebijakan dari lembaga Pondok Pesantren yang berada di naungan pemerintah Dinas pendidikan Sampang ditempuh secara baik dan ditempuh sebaik-baik mungkin oleh lembaga pendidikan formal yang ada di lembaga Pondok Pesantren untuk mengikuti anjuran untuk berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang bersumber dari naungan keduanya yaitu pemerintah Dinas pendidikan dan lembaga Pondok Pesantren dalam sebuah kebijakannya.

Dengan demikian dampak dari kebijakan pengaruh positif akan membentuk karakter lembaga sekolah pendidikan formal dengan pembentukan karakter mematahkan kebijakan kebijakan demi perkembangan sekolah agar bisa berkembang dan diterima oleh berbagai pihak dengan upaya pengelola dan pengasuh Pondok

Pesantren yang sudah bersutruktur demi kemajuan dan meningkatkan mutu secara islami bagi anak-anak bangsa di sekolah kejuruan SMK Darul Ulum II Al-Wahidiyah Omben Sampang dan SMK Al-Amanah Omben Sampang.

e. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Temuan penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pesantren dalam Peningkatan Mutu Sekolah Kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah mencakup pada manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu pengasuh mentoleransi atas kebijakan pengeloan dana bantuan tersebut dan pemerintah Dinas Pendidikan sekolah wajib membuat Rencana Kegiatan (RKAS) dan Surat Bertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan JUKNIS. Eksistensi Pesantren dalam Pengembangan Operasional Sekolah Kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah dimana kedua sekolah dibangun oleh pengasuh dengan modal pribadi mereka karena di Era sekarang orang tua ingin anaknya bukan hanya memiliki ilmu agama saja tapi juga memiliki ilmu umum dan disisi lain lembaga mengadakan musyawarah dengan pengurus Pondok Pesantren dan Pengurus yang ada di Sekolah Formal tersebut.

Problematika dalam Manajemen Peningkatan Mutu di Sekolah Kejuruan di Pondok Pesantren Darul Ulum II Al-Wahidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amanah Omben Sampang dengan permasalahan yang muncul yaitu kekurangan guru produktif karena hal ini terjadi tidak sesuai dengan keinginan pihak sekolah yang mendirikan sekolah kejuruan dampaknya yaitu pada siswa dan juga masalah yang terjadi pada siswa yang praktek magang yang berkendala karena jarak jauh sekolah dengan tempat magang, hal ini juga terjadi di sekolah yang bertolak belakang dengan kebijakan Pondok Pesantren dengan siswa tidak bisa magang karena kegiatan pondok yang padat.

5.2 Saran

1. Bagi pihak pengurus dan pengelola sekolah, kepala sekolah, guru dan staf terus melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan arah Dinas Pendidikan agar sekolah bisa terus berkembang dalam manajemen peningkatan mutu bagi kedua sekolah tersebut.

2. Bagi pengasuh Pondok Pesantren sebagai panutan masyarakat apa lagi dalam dunia pendidikan Pengasuh terus meningkatkan lembaga pendidikan di era modern seperti saat ini dengan membentuk pondok pesantren modern agar ilmu agama dan ilmu umum bisa juga di dapatkan oleh santri dan diminati oleh masyarakat.
3. Bagi pemerintah harus memperhatikan situasi Lembaga Pondok Pesantren yang ingin mendirikan SMK sebab hal tersebut akan berdampak pada manajemen perkembangan sekolah yang tidak sesuai dengan program yang ada di Pesantren, maka pemerintah Dinas Pendidikan mensurvei kondisi sekolah sebelum izin operasional diturunkan bagi sekolah formal yang ada di naungan Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ridwan. 2015. *Pendidikan Karter di Pesantren*. Bandung: Cipta Pustaka Media Print.
- Alwi Marjani. 2013. *Pondok Pesantren Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya*. Jurnal.
- Atiqullah. 2012. *Manajemen & kepemimpinan pendidikan islam*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Faizah Ninuk. 2015. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Tesis.
- Ghony M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Hidayat Tatang. 2018. *Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal.
- Ikhwan Afiful. 2017. *Development of Quality Management Islamic Education in Islamic Boarding School*. Jurnal.
- Ismail Feiby. 2016. *Mengurai Problematika Pendidikan Indonesia*, Jurnal.
- Komar Mujamil. 2015. *Dimensi Manajemen Perkembangan Islam*. Jakarta Timur: Erlangga.
- Saefullah. 2014. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2015. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Syaodih Nana. 2016. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: Refika Aditama.

- Sholeh Muh & Idrus Alfandi. 2018. *Building Social Intelligence Based on Islamic Boarding School Values*. Jurnal International Conference on Rural Studies in Asia.
- Tafsir Ahmad. 2016. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: Ramaja Rosdakarya Offset.
- Triwiyanto Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Usman Husaini .2016. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* akarta: Bumi Aksara.
- Widyani Nur & Moch Widiyanto. 2016. *Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Zuhriy Syaifuddin. 2011. *Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren Salaf*. Jurnal.